




PEMERINTAH KOTA TANGERANG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANGERANG

NOMOR SOP	:	053.3/043-PP
TANGGAL PEMBUATAN	:	05 JANUARI 2024
TANGGAL REVISI	:	JANUARI 2024
TANGGAL EFEKTIF	:	JANUARI 2024 - S/D ADANYA REVISI SELANJUTNYA
DISAHKAN OLEH	:	 KEPALA DINAS P3AP2KB Drs. H. JATMIKO, MAP PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.C NIP.197509131994121001
NAMA SOP	:	PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA)
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
1	INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2000 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL	MEMAHAMI PEMBUATAN ADMINISTRASI KEGIATAN
2	PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH	
3	PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH	
4	PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER	
5	PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 91 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA TANGERANG	
6	PERATURAN WALI KOTA TANGERANG NOMOR 143 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
7	PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	
8	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 143 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
KETERKAITAN DENGAN SOP LAIN		PERALATAN/PERLENGKAPAN
		1. DASAR HUKUM PENUNJANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA TANGERANG
		2. DAFTAR NAMA STAKEHOLDER INTERNAL PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA TANGERANG
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. APABILA TIDAK DILAKSANAKAN MAKA TIDAK AKAN ADANYA PEMBENTUKAN POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA TANGERANG DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER		
2. JIKA SOP TIDAK DILAKSANAKAN AKAN MENGHAMBAT PROSES PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA TANGERANG		



		PEMERINTAH KOTA TANGERANG				NOMOR			
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				NO. REVISI/TERBITAN			
		SOP PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA)				TANGGAL BERLAKU			
						HALAMAN			
NO	PROSES					KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
		KASI	KABID	KADIS	BAGIAN HUKUM				
1	MENGUSULKAN DRAFT SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA						3 JAM	DRAFT SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA	
2	MEMBUAT DRAFT SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA					DRAFT SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA	3 JAM	DRAFT SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA	
3	MENGAJUKAN DRAFT SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA KE BAGIAN HUKUM					DRAFT SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA	24 JAM	DRAFT SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA	
4	MENKOREKSI DRAFT DAN PROSES PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA KE BAGIAN HUKUM					SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA	80 JAM	SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA	
5	MENYAMPAIKAN SURAT PENGANTAR DAN DRAFT KEPUTUSAN KEPADA DINAS DARI BAGIAN HUKUM					SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA	3 JAM	SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA	
6	MENYAMPAIKAN SURAT KEPUTUSAN KE BIDANG					SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA	1 JAM	SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA	
7	MENDISTRIBUSIKAN SURAT KEPUTUSAN KE POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA					SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA	24 JAM	SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG POKJA DAN FOCAL POINT TINGKAT KOTA	
JUMLAH							138 JAM		